



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPSTSP/2019  
Tanggal Pembuatan : Maret 2019  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : Maret 2019  
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN,SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Usaha Perkebunan**

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perkebunan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3480/KPTS/HK.300/9/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor. 20 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan.
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPM PTSP.
6. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Pertanian

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

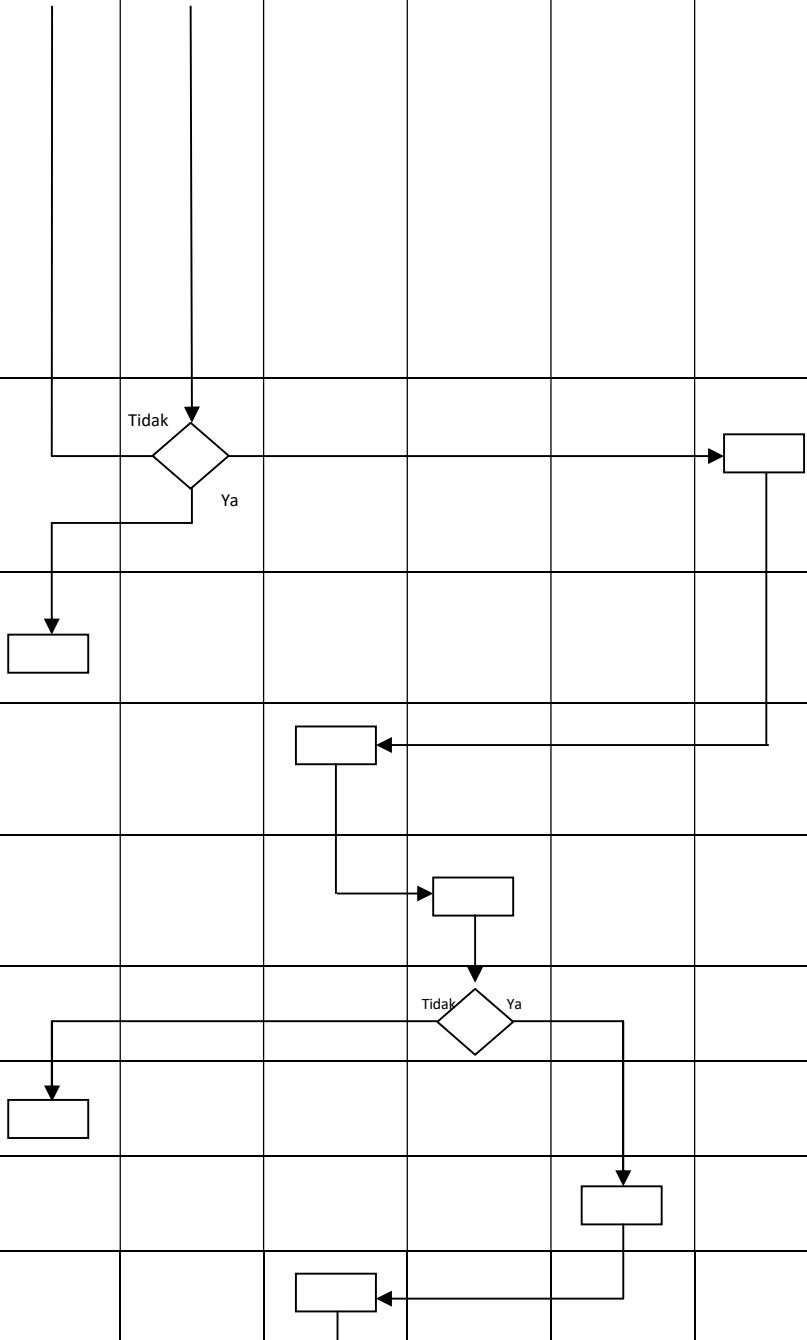
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

## SOP PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERKEBUNAN

No.		Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMTSP	Kelengkapan	Waktu (30 Hari)	Output	
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>							<p><b>Daftar Izin Usaha Perkebunan (IUP) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000;</li> <li>2 Fotocopy KTP;</li> <li>3 Fotocopy SIUP dan TDP</li> <li>4 Surat Keterangan Domisili</li> <li>5 Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yg terakhir (jika berbadan hukum)</li> <li>6 Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;</li> <li>7 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur.</li> <li>8 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi yang membidangi urusan kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)</li> <li>9 Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati.</li> <li>10 Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.</li> <li>11 Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>12 Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum,</li> <li>13 Pernyataan Kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</li> <li>14 Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran,</li> <li>15 Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat (sesuai Pasal 6 PERDA No.20 Th.2011)</li> <li>16 Pernyataan Kesediaan untuk melakukan kemitraan</li> <li>17 Fotocopy NPWP yang telah di verifikasi sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak</li> <li>18 Fotocopy pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan Badan / Perorangan</li> <li>19 Rekomendasi OPD Teknis</li> </ol> <p><b>Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000;</li> <li>2. Fotocopy KTP;</li> </ol>	1 Menit	Berkas Permohonan	

											<p>3. Fotocopy SIUP</p> <p>4. Surat Keterangan Domisili</p> <p>5. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yg terakhir (jika berbadan hukum)</p> <p>6. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;</p> <p>7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur.</p> <p>8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi yang membidangi urusan kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)</p> <p>9. Rencana kerja Pembangunan perkebunan.</p> <p>10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>11. Pernyataan Kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</p> <p>12. Pernyataan sanggup memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran,</p> <p>13. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya (PERDA No.20 TH 2011 Pasal 6)</p> <p>14. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.</p> <p>15. Fotocopy NPWP Badan / Perorangan yang telah di verifikasi sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak</p> <p>16. Fotocopy pembayaran iuran BPJS Kesehatan / ketenaga kerjaan</p> <p>17. Rekomendasi OPD Teknis</p> <p><b>Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P) :</b></p> <p>1. Mengisi Formulir Permohonan bematerei 6000;</p> <p>2. Fotocopy KTP;</p> <p>3. Fotocopy SIUP</p> <p>4. Surat Keterangan Domisili</p> <p>5. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yg terakhir (jika berbadan hukum)</p> <p>6. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;</p> <p>7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur.</p> <p>8. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan</p> <p>9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

										10. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan. 11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 12. Pernyataan Kesiapan untuk melakukan kemitraan 13. Fotocopy NPWP Badan / Perorangan yang telah di verifikasi sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak 14. Fotocopy pembayaran iuran BPJS dan Ketenaga kerjaan kesehatan Badan / Perorangan 15. Rekomendasi OPD Teknis			
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan	28 hari	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	



10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 Menit	Surat Izin	
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

